



Gender

dalam **Hubungan Internasional**
di **Indonesia - Australia**

Editor :

Sartika Soesilowati

Badrus Sholeh

Elisabeth Dewi

Komunitas Studi Gender

puan dalam jabatan penting tersebut. Diusulkan dalam tulisan ini bahwa agar tercapai peningkatan peranan posisi perempuan di jabatan puncak maka perlu dukungan situasi politik domestik dan internasional yang kondusif.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan bilateral Indonesia dengan Australia yang berwawasan gender akan bisa menguntungkan dan meningkatkan secara simultan, komprehensif, dan mutualisme. Bahwa pertimbangan gender dalam hubungan bilateral akan meningkatkan kualitas hubungan kedua negara yang saling menguntungkan. Dampak dari hubungan bilateral yang mempertimbangkan keberpihakan gender akan mencakup kepentingan rakyat yang lebih inklusif termasuk kepentingan perempuan yang selama ini terpinggirkan bila menyangkut hubungan antarnegara. Dikarenakan Indonesia dan Australia menghadapi permasalahan yang sama yaitu langkanya peran dan representasi perempuan di level pembuat kebijakan dan eksekutif tinggi, maka hubungan bilateral yang berwawasan gender ini juga akan memberikan spirit, dorongan untuk meningkatkan peran perempuan di masing-masing negara.

Referensi

- Bloom, M. (2017). Constructing Expertise: Terrorist Recruitment and "Talent Spotting" in the PIRA, Al Qaeda, and ISIS. *Studies in Conflict and Terrorism*, 40(7), 603–623. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2016.1237219>
- IPAC. (2017). *The Radicalisation of Indonesian Women Workers in Hong Kong*. (39), 22.
- Peterson, V.S. (2003). *A Critical Rewriting of Global Political Economy: Integrating Reproductive, Productive, and Virtual Economies*. London: Routledge

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	vii
Prolog.....	xi
Daftar Isi.....	xix
Feminisasi Pekerja Migran Perempuan Indonesia: Perspektif Internasional.....	2
Identifikasi Remitansi Sosial Mantan Pekerja Migran Perempuan dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran.....	20
Perkawinan Tidak Tercatat: Studi pada Perempuan Pekerja Migran Indonesia di Jeddah.....	39
Perlindungan Pekerja Migran Perempuan; Sebuah Kajian dengan Pendekatan Feminis.....	57
(Studi Kasus: Pekerja Migran Perempuan Asal Jawa Barat).....	57
Gender dan Pertumbuhan Ekonomi Hijau.....	74
Dampak Bantuan Pembangunan Internasional Terhadap Pemberdayaan Perempuan: Studi Kasus proyek <i>Restoring Coastal livelihoods</i> Oxfam di Sulawesi Selatan, Indonesia.....	91
<i>The Sisterhood Community Centre</i> : dari Perempuan untuk Memberdayakan Sesama Perempuan.....	113

Peran Simbok (Perempuan Desa) dalam Menarik Wisatawan Asingberbasis Kearifan Lokal (Seni <i>Kothekan Lesung</i>) Melalui Media Sosial.....	132
Ancaman Radikalisme dan Terorisme pada Perempuan Pekerja Migran Indonesia dalam Analisis Gender.....	152
Gender dan Terorisme: Peran Perempuan Isis di Asia Tenggara.....	170
<i>Inong Balee</i> sebagai Gerakan Feminisme dalam Resolusi Konflik di Aceh.....	184
Legasi Asian Games 2018: Keberdayaan Atlet Perempuan Indonesia sebagai Sumber <i>Soft Power</i>	204
Imej Maskulinitas dalam Diskursus Kebijakan Luar Negeri Australia Terhadap Timor Timur.....	222
Pengaruh Sosialisasi Gender Terhadap Peningkatan Peran Perempuan di dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Sebuah Penelitian Awal.....	247
Pengembangan Etika Hubungan Indonesia-Australia dari Perspektif Gender.....	270
Peningkatan SDM Perguruan Tinggi yang Berkadiliran Gender Melalui Ia-Cepa.....	290
Diplomasi Pendidikan Australia-Indonesia; Kesempatan dan Tantangan bagi Perempuan Timur Indonesia.....	307
Kolaborasi Indonesia dan Australia dalam Penanganan Pengungsi Perempuan.....	324
Kerja Sama Internasional Kemanusiaan "Australia-Indonesia" dalam Penanggulangan HIV/AIDS dan Bahaya Narkotika di Indonesia.....	346
Integrasi Ruang Publik yang Aman bagi Perempuan dengan Konsep Kota Pintar di Melbourne dan Jakarta.....	367

Gender dan Seksualitas dalam Hubungan Internasional <i>Pengalaman Indonesia dan Australia</i>	384
Kartini dalam Konspirasi Politik Pemerintah Kolonial.....	400
Isu VS Representasi: Pengaruh Pemimpin Perempuan dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia dan Australia.....	418
Biodata Penulis.....	439
Epilogue.....	449

***Inong Balee* sebagai Gerakan Feminisme dalam Resolusi Konflik di Aceh**

Dr. Rasyidin, S.Sos., M.A.²⁵

Fidhia Aruni, S.I.Kom. M.A.P.²⁶

PENDAHULUAN

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang mengalami konflik bersenjata dengan Pemerintah Republik Indonesia dan rakyat Aceh menyaksikan langsung kekerasan tersebut yang terjadi selama 32 tahun tanpa jeda. Daerah ini pernah diberlakukan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) untuk memberantas Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pemberontakan ini dimulai pada tanggal 4 Desember 1976. Pemberontakan di Aceh bukan hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja, kaum perempuan pun mempunyai peran yang sangat signifikan. Hal ini dilakukan oleh perempuan Aceh

berkiblat kepada sejarah masa lampau karena daerah Aceh memiliki jiwa pejuang perempuan yang sangat hebat pada masa lalu.

Sejarah gerakan perempuan di Aceh sudah pasti mengingatkan kita semua kepada ratu Sultanah serta para pahlawan perempuan yang berasal dari Aceh. Pergerakan kemerdekaan Indonesia tidak luput dari perjuangan para perempuan Aceh dalam melawan penjajah. Kekuatan perempuan dalam melindungi diri, keluarga, bahkan tanah air adalah upaya penuh kesadaran dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan.

Beberapa kerajaan di Aceh pernah dipimpin oleh Kaum perempuan (*Ureung Inong*). Berbagai ratu memimpin kerajaan tersebut. Pada masa kerajaan dipimpin oleh Laksamana Malahayati ada salah satu armada perang yang diberi nama Armada *Inong Balee*. Armada ini menjadi armada tersebar Kerajaan Aceh dibidang militer. Menjadi armada yang paling disegani oleh Kerajaan Portugis, serta Eropa pada masa tersebut. Armada *Inong Balee* diberikan pelatihan militer selama masa berperangan terjadi, mereka tidak hanya melindungi secara domestik tetapi turut mengangkat senjata melawan para penjajah.

Perjalanan waktu menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, dan Aceh menjadi salah satu Provinsi yang diberikan keistimewaan karena jasa Aceh kepada kemerdekaan Indonesia. Sejak tahun 1953 sampai tahun 2005 Aceh memberikan perlawanan terhadap Republik Indonesia sehingga pada tahun 1989 sampai tahun 1998 daerah Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).

Masa-masa pergolakan DOM di Aceh yang mendapat imbas terbesar adalah para perempuan, mereka ditinggalkan oleh kaum laki-laki yang ikut serta dalam memperjuangkan Aceh Merdeka. Perempuan mengalami masa-masa sulit yaitu kehilangan suami, kehilangan anak, pelecehan seksual, penganiayaan, dan tindakan-tindakan yang memberikan tekanan psikologis terhadap kaum perempuan. Dari 103 kasus kekerasan terhadap perempuan yang

²⁵ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Provinsi Aceh.

²⁶ Dosen Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nasional, Lhokseumawe, Provinsi Aceh.

terjadi dari sebelum 1999 sampai setelah penandatanganan Nota Kesepakatan (MOU Helsinki) tahun 2007, lebih dari setengahnya merupakan kekerasan seksual seperti perkosaan dan penyiksaan seksual (Komnas Perempuan, tahun 2007). Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, mencatat 128 kasus perkosaan selama Era Darurat Sipil Militer saja (Kontras, 2006). Forum LSM NAD memperkirakan sekitar 15.000 perempuan meninggal selama terjadi konflik di Aceh dan menyebabkan trauma psikologis dari sekitar 7.000 perempuan (Kamis, M., 2006).

Tuntutan rakyat Aceh adalah kemerdekaan dan terpisahnya Aceh dari Republik Indonesia. Pada masa tuntutan terjadi pembentukan suatu gerakan yang diberi nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM), gerakan tersebut menuntut dan memperjuangkan kemerdekaan Aceh dan mengembalikan kedaulatan rakyat Aceh sebagai negara yang mulia di mata universal atau dunia.

Gerakan Aceh Merdeka mulai merekrut pasukan untuk mendukung pergerakan memperjuangkan Aceh, sistem perekrutan dilakukan kepada laki-laki dan perempuan. Gerakan kaum perempuan selanjutnya diberikan nama *Inong Balee*. Gerakan kaum perempuan pada masa penjajahan tidak berbeda dengan pada masa pergolakan menuntut Aceh Merdeka. Pasukan *Inong Balee* menunjukkan kualitas sebagai gerakan yang beranggotakan perempuan-perempuan hebat dan kuat serta tidak tinggal diam dalam membela bangsa dan agama.

Inong Balee adalah sebutan terhadap pasukan perempuan dalam Gerakan Aceh Merdeka, *Inong Balee* hanya beranggotakan perempuan, selain sebagai nama yang disadur ulang pada masa Laksamana Malahayati yang memiliki makna lain sebagai perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya, tetapi pada *Inong Balee* yang berada pada Gerakan Aceh Merdeka adalah gabungan perempuan yang sudah menikah, para gadis, dan yang ditinggal meninggal oleh suaminya. *Inong Balee* merupakan gerakan feminisme yang tidak dapat terlepas dari masa kerajaan, masa Indonesia merdeka sam-

pai kepada masa berakhirnya konflik vertikal yang terjadi antara Republik Indonesia dan Provinsi Aceh.

Jacqueline Siapno, seorang peneliti Aceh dari Philipina menyebutkan bahwa fenomena *Inong Balee* merupakan bentuk politik perempuan Aceh di dalam wilayah konflik. Keberadaan *Inong Balee*, membuktikan bahwa perempuan mempunyai kemampuan untuk tampil sebagai perantara (agen) yang melakukan sejumlah muslihat, semacam negosiasi, dengan aparat militer. Muslihat, dalam pemahaman orang Aceh, adalah strategi bertahan menghadapi tekanan, yang jika dijabarkan meliputi, pertama, kemampuan memimpin di belakang layar dan bukan di garis depan. Kedua, kemampuan menggunakan bahasa tubuh sesuai dengan situasi. Ketiga, kemampuan merayu sebagai ungkapan negosiasi yang taktis. Keempat, kebijaksanaan untuk membaca di balik ihwal yang tampak tak penting namun sebenarnya penting. Kelima, menunggu dan sabar, mengulur keadaan, tetapi bukan dalam artian berkompromi. Kiasan muslihat ini terdapat dalam puisi Aceh lama, yang disebut *lhek jaga meulet*, (*lhek* adalah sejenis burung) yang menggunakan kecerdikan dan daya pikatnya untuk menghadapi musuh (Siapno, 2002).

Inong Balee yang hadir dan bergabung dalam Gerakan Aceh Merdeka merupakan bukti turut sertanya perempuan dalam memperjuangkan pembebasan diri dari sebuah penjajahan dalam bentuk sebuah gerakan feminisme. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk membahas mengenai *Inong Balee* sebagai Gerakan Feminisme dalam Resolusi Konflik di Aceh.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sejarah *Inong Balee* sebagai gerakan feminisme dalam resolusi konflik di Aceh?
2. Bagaimana keadaan *Inong Balee* pasca MOU Helsinki di Aceh saat ini?

TEORI RELEVAN

Feminisme Etis

Pada umumnya gerakan feminisme terbentuk sebagai gerakan yang memperjuangkan kebebasan kaum perempuan (feminisme) yang selama ini merasa dirugikan karena selalu dimordudakan oleh kaum laki-laki (maskulin) dalam berbagai bidang sosial, pekerjaan, pendidikan, dan politik khususnya bagi masyarakat yang masih menganut budaya patriarki (Rasyidin, Fidia, 2016).

Konsep feminisme dalam resolusi konflik di Aceh yang dilakukan oleh Gerakan *Inong Balee* adalah konsep feminisme etis. Feminisme etis adalah salah satu aliran feminisme yang menekankan etika kepedulian dalam melakukan gerakannya. Etika kepedulian merupakan etika khas perempuan yang dilawankan dengan etika keadilan yang umumnya khas digunakan oleh laki-laki (Arivia, 2003: 278). Etika kepedulian mengedepankan aspek empati dan simpati dalam memperjuangkan kedudukan perempuan sehingga tidak ada aspek kekerasan seperti yang digunakan pada konsep feminisme liberal.

Salah satu tokoh Feminisme Etis adalah Carol Gilligan dia banyak berbicara tentang perempuan yang hendaknya memiliki ukuran nilai moral yang berbeda dengan laki-laki. Nilai moral khas laki-laki selama ini telah terinternalisasi dalam seluruh kehidupan bermasyarakat, sehingga yang berkembang adalah nilai kekerasan yang berusaha menundukkan dan mendominasi manusia lain (Humm, 1992: 219). Oleh karena itulah perlu dimunculkan "Suara Yang lain", yaitu suara perempuan untuk mengimbangi "dunia laki-laki" yang cenderung kaku, keras dan kasar (termasuk militeristik). Pandangan kaum Feminis Etis ini sesungguhnya sangat tepat jika dianalogkan dengan keberadaan alam semesta yang terdiri atas berbagai hal yang berlawanan, berpasangan tetapi keberadaan satu dengan yang lain saling mengandaikan, seperti keberadaan

berbagai hal yang terdapat di alam yang bertujuan saling melengkapi, bukan saling men subordinasi bahkan meniadakan.

Suatu hal terpenting dalam konsep ini tidak lain adalah memberikan kepedulian yang sangat berguna dalam menyelesaikan konflik yang melanda sebuah masyarakat. Dalam mengungkapkan ide dan pendapatnya para Feminis Etis sesungguhnya lebih banyak menggunakan metode kritik, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Feminisme Etis sesungguhnya merupakan Feminisme Kritis. Gerakan feminis ini terutama ditujukan untuk dua hal, pertama yaitu usaha mengembangkan pengetahuan teoretis tentang moralitas untuk menghentikan penindasan terhadap perempuan dengan memberikan arah dan tujuan yang jelas. Kedua, mengembangkan wacana moralitas yang didasarkan atas pengalaman moral perempuan.

Tujuan pertama tersebut sifatnya normatif, yaitu memberikan syarat-syarat atau rambu-rambu bagi perempuan untuk memperjuangkan eksistensinya; sedangkan yang kedua lebih deskriptif, menyangkut pengalaman moral perempuan (Brenan, 1999:860).

Gerakan feminis ini terutama ditujukan untuk dua hal, pertama yaitu usaha mengembangkan pengetahuan teoretis tentang moralitas untuk menghentikan penindasan terhadap perempuan dengan memberikan arah dan tujuan yang jelas. Kedua, mengembangkan wacana moralitas yang didasarkan atas pengalaman moral perempuan. Tujuan pertama tersebut sifatnya normatif, yaitu memberikan syarat-syarat atau rambu bagi perempuan untuk memperjuangkan eksistensinya; sedangkan yang kedua lebih deskriptif, menyangkut pengalaman moral perempuan yang kemudian dituangkan dalam sejumlah buku dan artikel tentang Feminisme Etis (Brenan, 1999:860).

Resolusi Konflik

Konflik adalah situasi di mana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain, sehingga

satu atau keduanya saling terganggu (Nardjana, 1994). Konflik dibagi dalam dua jenis, yaitu konflik horizontal dan konflik vertikal. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antardaerah ataupun antarsuku, sedangkan konflik vertikal diartikan sebagai perselisihan kelompok masyarakat atau wilayah tertentu dengan Negara atau pemerintah. Hal ini sesuai dengan kondisi konflik yang terjadi di Aceh, yaitu terjadinya konflik antara kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketika dikaji mengenai konflik, maka konflik tersebut dapat dilihat dalam 3 perspektif yaitu: *pertama*, **Perspektif Tradisional** yaitu konflik tidak boleh ada di dalam suatu negara, daerah, atau wilayah, karena itu konflik harus diselesaikan walaupun dengan berbagai cara, termasuk cara militer. Pendekatan ini menjaga supaya tidak ada disintegrasi bangsa atau daerah. *Kedua*, **Perspektif Behavioral** yaitu konflik tersebut merupakan hal yang alamiah oleh karena itu tidak perlu diragukan, namun konflik ini sebagai ujian kinerja bagi Pimpinan Negara atau wilayah, sedangkan yang ketiga, **Perspektif Interaksional** yaitu konflik memang diciptakan karena ada pihak-pihak yang diuntungkan, keuntungan yang paling utama adalah di bidang ekonomi dan bidang politik.

Resolusi konflik (*conflict resolution*) adalah suatu kesepakatan yang membahas berbagai penyebab konflik dan mencoba untuk membangun hubungan baru dan abadi di antara kelompok-kelompok yang saling bertikai (Jamil, M. Mukhsin, 2007: 13-14). Resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan (internet, diakses 30 November 2018)

Resolusi konflik menurut Burton (1990) adalah strategi yang didasarkan pada asumsi dan pemahaman yang relatif lebih komprehensif terhadap konflik. Strategi yang didasari oleh asumsi sering kali berangkat atas pemikiran bahwa perbedaan ataupun

ketidaksesuaian kepentingan antara pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dinegosiasikan atau dimusyawarahkan.

Strategi resolusi konflik di Aceh berbeda dengan penyelesaian konflik yang terjadi daerah lainnya, *Hendry Dumamd Center* (HDC) sebagai fasilitator perdamaian di Aceh menyebutkan bahwa resolusi konflik di Aceh didasarkan pada momentum bencana alam tsunami yang menjadi jeda kemanusiaan sehingga strategi yang ditawarkan oleh HDC tidak digunakan pada masa tersebut. Momentum tersebut menjadikan pihak-pihak yang bertikai menyadari bahwa konflik berkepanjangan ini harus segera dihentikan atau diselesaikan atas dasar rasa kemamusiaan dari masyarakat Aceh untuk masyarakat Aceh itu sendiri.

Walaupun strategi yang dibangun oleh HDC belum bisa menghasilkan atau menyepakati perdamaian paling tidak usaha ke arah perdamaian sudah mulai dirintis. Ketidakberhasilan tersebut ditentukan oleh banyak kendala-kendali, baik di tingkat lokal, nasional, maupun tingkat internasional.

Pembangunan Perdamaian (*Peace Building*)

Pembangunan Perdamaian (*Peace Building*) adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui proses *peace building* diharapkan *negative peace* (atau *the absence of violence*) berubah menjadi *positive peace* di mana masyarakat merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan keterwakilan politik yang efektif. Pembangunan perdamaian merupakan sebuah tujuan dalam program resolusi konflik, namun dalam membangun hal tersebut tidaklah mudah seperti yang dibayangkan, karena harus memperhatikan berbagai kondisi. Pembangunan perdamaian harus memperhatikan kondisi sosial, politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya di sebuah wilayah atau daerah maupun Negara.

Merubah *negative peace* menjadi *positive peace* masih memerlukan pendekatan *pluralisme* yaitu memperhatikan seluruh aspek yang dimiliki oleh sebuah daerah. Untuk merealisasikannya dipengaruhi juga oleh berbagai instrumen yang ada dalam masyarakat tersebut. Elemen yang ada dalam masyarakat harus dipakai atau dilibatkan, misalnya pengaruh infrastruktur politik, keterlibatan tokoh agama, intelektual, media massa, wartawan, dan mahasiswa.

Dari keseluruhan tahapan penyelesaian konflik *peace building* merupakan instrumen yang paling tepat dan lengkap dibandingkan dengan *peace keeping* dan *peace making*, disebabkan *peace building* merupakan penggabungan dari dua konsep penyelesaian konflik sebelumnya. Orientasinya didasarkan kepada perdamaian sedangkan konsep *peace keeping* hanya terbatas pada proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui penggunaan pendekatan keamanan atau intervensi militer (*Realisme Approach*). Pendekatan ini menganggap bahwa negara atau wilayah sebagai sebuah aktor penting yang perlu dipertahankan walaupun dengan kekerasan sekalipun. Manakala *peace making* adalah proses yang tujuannya untuk mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui upaya-upaya media. Negosiasi, arbitrase pada level elit atau level pimpinan.

Sebagai salah satu bentuk manajemen konflik strategi yang dibangun dalam konsep *peace building* adalah menciptakan atau membangun perdamaian dari pada sekadar menghentikan konflik. Sama halnya dengan gerakan *Inong Balee* yang secara sadar mereka tidak berkemampuan untuk menghentikan konflik, namun dengan upaya lainnya mereka berusaha untuk membangun dan menciptakan perdamaian dengan cara dan ciri khas keperempuanannya.

Perluasan aktivitas untuk membangun perdamaian melalui konsep *peace building* membuka ruang yang luas bagi partisipasi *Inong Balee* untuk berkontribusi dan berperan dalam membangun perdamaian di Aceh. *Inong Balee* memiliki alasan yang kuat dalam membangun perdamaian di Aceh, dikarenakan oleh tantangan

yang dilalui semasa konflik terjadi yang tidak hanya menghilangkan suaminya, namun juga menghilangkan nyawa-nyawa orang yang tidak bersalah.

SEJARAH *INONG BALEE* SEBAGAI GERAKAN FEMINISME DALAM RESOLUSI KONFLIK DI ACEH

Keterlibatan *Inong Balee* dalam resolusi konflik di Aceh merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dengan kehendak atau keinginan masyarakat Aceh untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan Aceh. Kehadiran *Inong Balee* dalam aktivitas penyelesaian konflik yang berkepanjangan di Aceh mendapat pujian dari berbagai kalangan, baik pada masa penjajahan maupun pasca penjajahan. *Inong Balee* sudah sangat berjasa di Aceh dalam memperjuangkan dan mempertahankan Aceh dari gempuran penjajah, baik penjajah Belanda, Jepang, maupun penjajah lainnya.

Ketangguhan seorang perempuan dalam berjuang mempertahankan agama, daerahnya dan kehormatan dirinya seperti yang terjadi pada masa konflik di Aceh menjadi motivasi yang sangat berharga. Di samping itu, juga terlihat dalam jati diri perempuan Aceh yang dikenal dengan sifat dan wataknya yang agamis, berani, dan tangguh, baik dalam memperjuangkan keluarganya maupun agama dan negara. Gerak dan langkah para perempuan di Aceh tidak mengenal lelah menjadi warna dalam perkembangan sejarah di Aceh. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan Aceh dalam sejarah sebagianannya adalah karena campur tangan perempuan atau *Inong Balee* Aceh.

Kemampuan *Inong Balee* dalam melakukan negosiasi di berbagai kontestasi sangat mengagumkan. Pada masa lalu Aceh memiliki perempuan-perempuan perkasa seperti, Keumala Hayati, Cut Nyak Dhien, dan Cut Mutia. Pada masa penyelesaian konflik Aceh keterlibatan *Inong Balee* juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Pada masa persiapan *Memorandum of Understanding* (MOU)

antara GAM dengan pemerintah Republik Indonesia, jasa dan pengorbanan *Inong Balee* sangat signifikan perannya, misalnya mendirikan Liga Inong Aceh (LINA) yang bertugas dalam bidang pemberdayaan *Inong Balee* supaya bisa berpartisipasi dalam mewujudkan perdamaian yang abadi di tanah Aceh.

Peranan perempuan Aceh sejak dahulu turut menentukan lamanya perang melawan penjajah. Tidak hanya menjadi isteri bagi suaminya yang berperang, menjaga anaknya, tetapi kalau diperlukan mereka bisa mengangkat senjata dengan suaminya ke medan perang. Inilah yang dialami oleh perempuan-perempuan Aceh pada masa konflik. Mereka memiliki semangat juang yang lahir dari nenek moyang terdahulu. Darah pejuang yang mengalir dalam diri perempuan Aceh masih ada sampai sekarang. Dapat dilihat dari semangat tinggi untuk ikut terlibat dalam tubuh GAM agar bisa memperjuangkan Aceh bagi kesejahteraan rakyat Aceh. Mereka tidak tinggal diam saja di rumah tetapi mereka juga ikut berpartisipasi sehingga mereka mau ikut latihan perekrutan untuk menjadi anggota GAM perempuan yaitu Pasukan *Inong Balee*.

Dalam konteks ini *Inong Balee* sudah termasuk dalam gerakan Feminisme Pejuang yang mampu menyaingi kaum laki-laki dalam peperangan di Aceh, dan turut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan Aceh yang berujung pada perdamaian di antara dua kubu vertikal yang saling konflik yaitu Gerakan Aceh Merdeka dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Puncak perdamaian tersebut terjadi pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia.

Resolusi konflik yang dihadirkan adalah Nota Perdamaian yang dinamai dengan MoU (*Memorandum of Understanding*) Helsinki. Nota perdamaian tersebut diresmikan di Helsinki tanggal 15 Agustus 2005. MoU Helsinki tersebut menjadi sejarah baru bagi rakyat Aceh setelah konflik vertikal yang berlangsung secara berkepanjangan. Peran *Inong Balee* sebagai gerakan feminisme jelas terlihat dalam terciptanya resolusi konflik di Aceh pada masa tersebut. Diketahui bersama tugas *Inong Balee* adalah sebagai

gerakan perempuan yang memiliki andil untuk mengampanyekan perdamaian secara terus-menerus baik di dalam maupun di luar negeri. Peran *Inong Balee* masa konflik mengantarkan logistik kepada para laki-laki yang sedang berperang, bahkan mereka juga mengangkat senjata sebagai bentuk pertahanan dan perlawanan sekaligus membantu kaum laki-laki.

Keterlibatan *Inong Balee* dalam tubuh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah untuk membantu perjuangan kaum laki-laki demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Aceh dalam segala bidang. Mereka tidak berdiam diri di rumah tetapi ikut berpartisipasi dalam mewujudkan Aceh yang damai dan bermartabat dan sebanding dengan daerah atau provinsi lain di Negara Republik Indonesia.

KISAH-KISAH *INONG BALEE* DALAM PERJUANGAN ACEH

Kisah-kisah perlawanan *Inong Balee* Aceh, bukan saja dialami oleh perempuan korban konflik, namun juga terjadi pada para perempuan (isteri para pejuang) yang ditinggalkan suaminya berjuang. Para perempuan yang memperjuangkan keadilan hukum ketika masa damai maupun perjuangan perempuan pada masa damai.

Pada masa konflik mereka ikut berjuang dengan suami dan angkatan perang lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh walaupun kondisi sangat menyulitkan. Pada saat menuju perdamaian atau MoU Helsinki, perempuan Aceh bermusyawarah untuk mendukung perdamaian, karena dengan ada perdamaian yang sejati di Aceh. Momentum puncak deklarasi perdamaian adalah tanggal 15 Agustus 2005. MoU Helsinki ini merupakan titik kulminasi suatu perjalanan panjang dalam menciptakan perdamaian abadi di Aceh. Sehingga semangat untuk berdamai yang menjadi salah satu inisiatif kaum perempuan Aceh tidak pupus begitu saja, seolah-olah perdamaian itu hanya milik kaum laki-laki saja.

Hal ini menunjukkan bahwa impresi adanya harapan yang begitu besar dari kaum perempuan untuk terciptanya damai di Aceh. Ini juga merupakan suatu keinginan yang sangat diidam-idamkan oleh banyak perempuan di Aceh. Dalam musyawarah perempuan Aceh selalu mendapatkan intimidasi dari berbagai pihak, meskipun demikian perempuan Aceh tidak pernah menyerah.

Tsunami merupakan bagian tersendiri dalam sejarah di Aceh di sampan konflik. Konflik dan tsunami menelan korban manusia dan harta benda. Tsunami tidak dapat dielakkan karena itu merupakan urusan Yang Mahakuasa, sedangkan konflik berasal dari manusia. Manusia yang membuat konflik dan manusia pula yang bisa meredakan konflik tersebut. Jauh sebelum tsunami terjadi, Aceh telah menderita dengan konflik tersebut. Masyarakat Aceh terjebak dengan baku konflik antara GAM dengan TNI sehingga seluruh aktivitas tidak bisa dijalankan secara normal karena ada gangguan keamanan yang sangat dahsyat. Pada masa ini kaum perempuan yang paling banyak merasakan konflik baik fisik maupun mentalnya. Mereka terjepit di tengah *cross fire*, baik dalam makna simbolik maupun harfiah. Di samping itu *Inong Balee* menjadi kepala rumah tangga untuk mendidik dan membesarkan putra putrinya menggantikan suami yang sedang berjuang di arena peperangan.

INONG BALEE PASCA MOU HELSINKI DI ACEH

Pasca konflik 32 tahun di Aceh, menyisakan trauma kepada masyarakat, khususnya para perempuan dan anak-anak. Pada masa tersebut sulit mengembalikan keadaan seperti tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Para perempuan mendapat tindakan kekerasan fisik dan non fisik saat konflik terjadi. Meskipun *Inong Balee* merupakan gerakan para perempuan yang turut langsung terjun di lapangan pada masa konflik, namun trauma mereka ditinggalkan suami berperang, negosiasi melalui rayuan kepada pihak lawan, dan tindakan-tindakan lain yang dilakukan tetap

menjadi perhatian oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonsiliasi (BRR) Aceh yang dibentuk khusus untuk melakukan rehabilitasi secara fisik dan non fisik seperti pengadaan unit *Trauma Healing* untuk menyembuhkan psikologis para perempuan, anak-anak, dan masyarakat lain secara keseluruhan.

Perkembangan dari hasil musyawarah *Inong Balee* yang disuarakan melalui *Duek Pakat Inong Aceh* yang disalurkan melalui berbagai saluran baik yang ada di dalam negeri maupun yang disuarakan melalui jaringan Internasional melalui NGO Internasional. Maka perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 15 Agustus 2015 di Helsinki membuahkan nota perdamaian yang disebut dengan *Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki*. Nota perdamaian tersebut pula menjadi *Blue Print* awal pembangunan Aceh pasca konflik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sejak penandatanganan MoU Helsinki tersebut, kemajuan dalam hal perdamaian menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan, hubungan kedua belah pihak semakin menakjubkan dalam mengawal dan menindaklanjuti MoU Helsinki itu. Peran *inong balee* sangat tidak optimal diperhatikan oleh *stake holders* daerah Aceh. *Inong balee* merupakan peletak dasar perdamaian tersebut. *Inong balee* menunjukkan bahwa dialog merupakan cara yang efektif untuk memulai perundingan damai, ini ditunjukkan oleh para aktivis perempuan atau *Inong Balee* sebagai pemegang mandat DPIA (Damai Melalui Duek Pakat Inong Aceh).

Perkembangan perdamaian melalui AMM (*Aceh Monitoring Mission*) di Banda Aceh telah berhasil mengawasi pemusnahan senjata-senjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan penarikan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI), pada even inipun kaum perempuan atau *Inong Balee* tidak signifikan dilibatkan.

MoU Helsinki merupakan resolusi konflik yang tidak terlepas dari sebuah pergerakan kaum feminisme, *Inong Balee* menggu-

nakan konsep feminisme etis, seperti diketahui feminisme etis berlandaskan kepedulian dalam pergerakannya untuk mencapai sebuah keadilan. Ciri khas perempuan yang memiliki kepedulian yang lebih tinggi menimbulkan efek kepedulian yang tinggi terhadap daerahnya kemudian para perempuan ini ikut tergerak memperjuangkan keadilan dan kemaslahatan rakyat Aceh.

Kepedulian *Inong Balee* yang didasarkan kepada konsep feminisme etis sudah membuktikan bahwa teori ini sesuai dengan fenomena yang terjadi dalam penyelesaian konflik di Aceh. Karena sifat dan fungsi dari feminisme etis adalah penekanan kepada etika kepedulian di dalam melakukan pergerakan melawan ketidakadilan di dalam berbagai hal atau bidang.

Pada saat ini di Aceh keberadaan mantan pejuang *Inong Balee* menjadi sangat berpengaruh dalam perkembangan dan pergerakan politik di Aceh. Mantan pejuang *Inong Balee* saat ini hadir dan ikut serta dalam kegiatan berpolitik di Aceh. Hal tersebut membuktikan bahwa sejarah gerakan *Inong Balee* sampai hari ini masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam memperjuangkan kemaslahatan dan keadilan bagi perempuan. Sehingga Pemerintahan dan seluruh Aceh tidak boleh sampai melupakan gerakan *Inong Balee* yang telah terbukti memiliki kemampuan dalam mewujudkan perdamaian di Aceh.

Aktivitas gerakan *Inong Balee* sampai kapan pun tidak boleh dilupakan oleh masyarakat Aceh, karena *Inong Balee* bukan hanya muncul pada masa gerakan konflik saja misalnya pada Gerakan Aceh Merdeka. Mereka muncul jauh sebelum adanya gerakan bersenjata tersebut. Mereka sudah ada sejak kerajaan Aceh sudah tahun yang lalu atau pada zaman kerajaan Iskandar Muda.

Peran perempuan pada saat penyusunan Undang-undang republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 Pemerintahan Aceh yang dikenal dengan (UUPA) baik kalangan *Inong Balee* maupun non *Inong Balee* mereka berpartisipasi di dalam memperjuangkan pengakuan dan penegakan hak asasi perempuan Aceh dalam

UUPA tersebut. Di dalam UUPA bahwa konsep *affirmative Action* (tindakan afirmasi) bagi perempuan Aceh terdapat di dalamnya, ini menunjukkan konsep *Convention on Eliminating Discrimination Against Women* (CEDAW) dan konsep feminisme sudah diterapkan.

Kondisi Aceh pasca MoU Helsinki mengharuskan *Inong Balee* berkontribusi dalam pembangunan di Aceh dalam segala bidang. Hal ini sesuai dengan prinsip *Gender and Development* (GAD) sebagai paradigma bahwa perempuan dan laki-laki tidak bisa dipisahkan dari aktivitas pembangunan. Aktivitas ini relevan dengan program yang dikenal dengan sebutan *Sustainable Development Goals* (SDG's) di mana *Inong Balee* selalu terlibat atau berpartisipasi di dalam pembangunan yang berkelanjutan di segala aspek tanpa adanya diskriminasi sedikit pun.

PENUTUP

Inong Balee sudah hadir dalam pergerakan sejarah di Aceh sejak zaman kerajaan, mereka menjadi salah satu armada militer di bawah kepemimpinan Laksamana Malahayati yang paling ditakutkan penjajah. Setelah Indonesia merdeka, pergerakan sejarah Aceh dilalui dengan konflik vertikal berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Republik Indonesia. Tuntutannya adalah kemerdekaan bagi rakyat Aceh yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa GAM membentuk sebuah poros baru bagi kaum perempuan Aceh yang menjadi naungan gerakan tersebut dan dinamai dengan sebutan *Inong Balee*. *Inong Balee* merupakan sebutan bagi gerakan yang beranggotakan perempuan Aceh yang sudah atau belum menikah atau telah ditinggal meninggal oleh suaminya yang gugur dalam perang yang terjadi selama konflik berlangsung.

Inong Balee sebagai gerakan feminisme menggunakan konsep feminisme etis dalam melakukan pergerakannya. Gerakan *Inong Balee* yang memiliki anggota perempuan secara keseluruhan membuk-

tikan dengan konsep feminisme etis menjadi instrumen penting dalam terciptanya sebuah resolusi konflik di Aceh yaitu sebuah nota perdamaian MoU Helsinki yang menjadi titik awal perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas *Inong Balee* sebagai pengantar logistik perang, mengampunayakan perdamaian dalam dan luar negeri, dan turut mengangkat senjata merupakan bentuk kepedulian kaum perempuan Aceh untuk mendapatkan keadilan dalam memperjuangkan kemerdekaan pada masa-masa konflik di Aceh.

Bentuk Partisipasi *inong Balee* pasca MoU Helsinki di bidang Politik dan kebijakan publik bahwa *Inong Balee* telah bergeser dari dunia bomestik ke ruang publik seperti terlibat dalam partai politik, sehingga mereka menjadi wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota (DPRK). Ini merupakan salah satu bentuk kesetaraan gender di Aceh. Keterlibatan *Inong Balee* dalam pelaksanaan pemerintahan di Aceh masih dirasakan oleh pemerintahan normal di Aceh. Aktivitas ini merupakan sebagai penerapan *Shadow state* walaupun tidak seefektif pada masa lalu atau masa konflik, masa persiapan menuju perdamaian bahkan pada masa perdamaian yang dibuat. Keberadaan *Inong Balee* di Aceh tidak bisa dilupakan secara semena-mena demi keberlangsungan perdamaian yang abadi dan keberlangsungan pembangunan di Aceh sebagai wujud dari pemberian hak istimewa di Aceh.

REFERENSI

- Abdurrahman, D., dkk. 2002. *Biografi Pejuang-Pejuang Aceh*. Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh: Banda Aceh.
- Aguswandi, dkk. 2008. *Rekonfigurasi Politik: Proses Perdamaian Aceh*. Conciliation Resources: London
- Aizid, Rizem. 2013. *Para Pemberontak Bangsa*. PT Palapa: Jogjakarta, Bungin,
- Al-Chaidar, dkk. 1988. *Aceh bersimbah darah, mengungkap penerapan status militer di Aceh*. Jakarta: Pustaka al-Kaustar.
- Al-Chaidar. 1999. *Gerakan Aceh Merdeka jihad rakyat Aceh mewujudkan negara islam*. Madani Press: Jakarta.
- Arivia G. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Yayasan Jurnal Perempuan. Jakarta.
- Brenan, Samantha. 1999. *Recent Work in Feminist Ethics*. Ethics, 109.
- Burton, John. 1990. *Conflict: Resolution & Provention*. New York: ST. Martin's Press.
- Di tiro, T Ihsan M. 2013. *Aceh di Mata Dunia*. Bandar: Publising: Banda Aceh.
- Halimah, 2008. *Kondisi Psikologis Wanita Aceh Mantan Tentara Gerakan Aceh Merdeka (Inong Balee)*. Naskah Publikasi. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.
- Ilasjmy, A. 1996. *Wanita Aceh sebagai negarawan dan punggawa perang*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Hastanti, Widy Nugroho. 2008. *Paradoks Gender; Kajian Feminisme Etis Terhadap Kemunculan Inong Balee dalam Kekerasan Politik di Aceh*. Jurnal Filsafat Vo. 18 Nomor 3.
- Kamis, Mazalan; Mahdi, Saiful. 2006. "Tsunami Response and Women", Paper presented at the international Conference on Development in Aceh at the National University of Malaysia, December 26-27, 2006.
- Mukhsin Jamil, M., dkk., 2007. *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*. WMC IAIN Wallsongo: Semarang
- Mukhsin, Rizal. 2008. *Inong Balee dalam Gerakan Aceh Merdeka 1976-2005*. Tesis Pascasarjana UIN Ar-raniry. Banda Aceh.
- Pattana, Eklefina. 2010. *Integrasi Pascakonflik (studi kasus di Maluku Tengah Saparua)*. Tesis Universitas Indonesia: Jakarta.
- Rasyidin, Fidhia Aruni. 2016. *Gender dan Politik; Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. Unimal Press: Lhoksumawe.

Siapno, J., 2002, *Gender, Islam, Nationalism and state in Aceh: The Paradox of Power, Co-optation and Resistance*. Routledge Curzon: London.

Susan, Novri. 2010. *Pengantar sosiologi konflik dan isu-isu konflik kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

<http://www.sicripps.ohio.edu/news/cmdd/artikele.htm>

GENDER, DIPLOMASI, DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI
